

Belum Ada Petunjuk dari Pemerintah Pusat



Sumber gambar : TribunKaltim.co.id Senin, 06/01/2025

➤ 6,5 Persen APBD untuk Program Makan Bergizi Gratis

SAMARINDA, TRIBUN – Program nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan mulai dilaksanakan pada tahun ini. Sebelumnya, sejumlah daerah telah menguji coba program ini di berbagai sekolah. Kota Samarinda menjadi salah satu daerah yang turut menjalankan uji coba tersebut.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda pun telah menunjukkan keseriusannya untuk mendukung program MBG dengan mengalokasikan anggaran sebesar 6,5 persen dari APBD 2025.

Menurut Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahroni Pasie, anggaran 6,5 persen dari APBD yang telah dialokasikan Pemkot Samarinda saat ini sifatnya masih sebatas antisipasi.

“Untuk finalisasinya belum, karena belum ada petunjuk dari pemerintah pusat. Saat uji coba, program ini langsung dijalankan oleh pemerintah pusat melalui TNI. Namun, ke depannya, pelaksanaan ini akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” jelasnya.

Novan juga menambahkan bahwa peran pemerintah daerah nantinya akan mencakup pendistribusian dan pengelolaan keuangan. Hanya saja, detail pelaksanaan tersebut belum dibahas secara menyeluruh.

Oleh karena itu, DPRD Samarinda berencana menggelar *hearing* untuk mendalami hal ini lebih lanjut. Termasuk menggelar diskusi dengan dinas terkait, seperti Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Kesehatan (Dinkes), untuk membahas berbagai aspek program MBG.

“Apakah *budget* yang ada memenuhi dengan standar kesehatan dan sesuai atau tidak harganya dengan harga produk di pasar kita. Kita akan berkoordinasi terus dan akan sama-sama *mereview*,” jelas Novan.

Di samping itu juga, Novan menyoroti pentingnya penggunaan bahan pendukung yang ramah lingkungan, seperti kotak makanan yang mudah terurai. “Jangan sampai bahan yang digunakan justru menambah beban lingkungan karena sulit diurai. Standar ini juga harus diperhatikan,” tegasnya.

Terkait dengan adanya rencana pelibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan program nasional ini, seperti *catering*, Novan menilai bahwa hal tersebut dapat menjadi langkah positif, asalkan berada dalam pengawasan yang ketat.

“Selama memenuhi standar pelaksanaan, tidak masalah jika melibatkan pihak ketiga. Bahkan, ini bisa menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar,” pungkasnya.

Sebelumnya di tahun 2024, setiap daerah setidaknya telah menguji coba program ini dengan menyasar ke sejumlah sekolah, seperti yang sama juga dilakukan di Kota Samarinda.

Wali Kota Samarinda, Andi harun, mengatakan bahwa program nasional MBG ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas gizi siswa, terutama yang berasal dari kelompok ekonomi rentan dan miskin.

Menurutnya, rendahnya literasi anak seringkali karena memang kondisi literasi anak kita pun masih rendah, dan salah satu di antaranya karena soal asupan, itu sebabnya perlu ada perbaikan gizi anak-anak,” ungkap Andi Harun. (snw)

Sumber berita:

1. TribunKaltim, Belum Ada Petunjuk dari Pemerintah Pusat, 06/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Perpres 83/2024), Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.
3. Diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Perpres 83/2024 bahwa sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan kepada:

- a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
- b. anak usia di bawah lima tahun;
- c. ibu hamil; dan
- d. ibu menyusui.